



## PNS Pemkot Terancam Tak Rayakan Lebaran

YOGYAKARTA (SINDO) – Sebanyak 8879 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terancam tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Penyebabnya, gaji bulan Oktober yang semestinya diterima per tanggal satu, mundur lima hari. Tidak hanya gaji yang akan diterima mundur, ribuan pegawai negeri sipil (PNS) ini juga terancam tidak menerima tunjangan hari raya (THR).

Kasubdit Pengelolaan Belanja Pegawai, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Yogyakarta, Christy Dewayani mengatakan, pengunduran penerimaan gaji PNS bulan Oktober ini disebabkan keputusan libur bersama per 29 September hingga 5 Oktober. "Selain itu, hingga saat ini belum ada pengaturan baru. Kami tetap menggunakan dasar Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 84/PB/2007 tentang tata cara pencairan dana pengelolaan keuangan daerah," katanya kemarin.

Kebijakan ini, kata dia, bisa berubah sewaktu-waktu jika pemerintah pusat mengeluarkan petunjuk baru. Dijelaskan, anggaran yang disiapkan pemkot untuk penggajian pegawai setiap bulannya mencapai Rp32,5 miliar. Dana sebesar itu diperuntukan bagi sekitar 8.900 pegawai.

Menyangkut THR, sejumlah pejabat yang berkompeten belum bersedia berkomentar apakah akan dicairkan atau tidak. Baik Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Wakil Wali Kota berargumen persoalan tunjangan hari raya sepenuhnya kewenangan dari Wali Kota.

Anggota Komisi I DPRD Kota Yogyakarta Chang Wendryanto berpendapat pemberian gaji dan THR merupakan hak bagi pegawai. Tidak hanya swasta tapi juga pegawai negeri.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005